

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi). Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kusnaedi, dkk.1995. *Membangun Desa: Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*. PT Penebar Swadaya. Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT Replika Aditama. Bandung.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2018. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Edisi 3-Cet. 6. Rajawali Pers. Depok.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintah Desa dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Jatim.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press. Bandung.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi-cet. 9. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

## **Jurnal dan Skripsi**

- Andry Lauda. 2018. *“Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*, Jurnal Supremasi, Vol 8. Nomor 2.
- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Hasyim Adnan, *“Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jurnal Al’Adl, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- M. Zulfan Hakim, *et.al.*, *“Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Tinjauan Hukum UNTAG (ULREV), Volume 4, Edisi 2, November 2020.
- Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng, *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso”*, EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 3 No. 3 Tahun 2019.
- Moh Gandara. 2020. *“Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat”*. jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3. Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.
- Mugni Rizki Junaedi, *“Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis”*, Jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018.
- Muhammad Irfan Hilmy dan Atanasya Melinda Making. 2021. *“Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa”*. Jurnal Supremasi. Volume 11. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.
- Naswar, *et.al.*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *“Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa”*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.21 No.2 November 2019.
- Zulkarnain Ridlwan. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 3 (Juli-September 2014).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

## **Internet**

Herman, "2.628 BUM Desa dan 40 BUM Desa Bersama Sudah Dapat Nomor Badan Hukum", diterbitkan Jumat, 14 Januari 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/878749/2628-bum-desa-dan-40-bum->

[desa-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum](#), diakses tanggal 21 September, Pukul 22.52 WITA.

Novri/Humas Kemendes PDTT, “Bermodal Dana Desa, Rp1,1 Triliun Pades Bersumber Dari Bumdes” diterbitkan Jumat, 15 Januari 2021, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes>, diakses tanggal 22 Februari 2023, Pukul 20.11 WITA.

**Sumber lain:**

RENSTRA (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 21083, email: [pmptspselayar@gmail.com](mailto:pmptspselayar@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 0545/Penelitian/1/2023/DIS PMPTSP**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : ZAHRA INAYAH  
Alamat Peneliti : Dusun Lembang Bau Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai  
Nama Penanggung Jawab : ZAHRA INAYAH  
Anggota Peneliti : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Pemenuhan tugas akhir perkuliahan program S1" di :

Lokasi Penelitian : Inspektorat dan Dis PMD Kab. Kepulauan Selayar,  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap  
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DES) Di  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
Lama Penelitian : 2 Bulan  
Bidang Penelitian : Hukum  
Status Penelitian : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023



Dikeluarkan : Benteng  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

A.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA DINAS**

Digitally signed by MUHAMMAD  
ARSYAD, SKM, MKes, MScPH  
Date: 2023.01.18 08:46:57 +08'00'

**MUHAMMAD ARSYAD, SKM, MKes, MScPH**  
NIP. 19750101 199903 1 010

Rp. 0,-

Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bonto No. 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/72/II/2023/ITDA

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 0545/Penelitian/II/2023/DIS PMPTSP, tanggal 18 Januari 2023, perihal Surat Keterangan Penelitian, bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **ZAHRA INAYAH**  
Alamat Peneliti : **Dusun Lembang Bau**  
**Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai**  
Bidang Penelitian : **Hukum**  
Status Penelitian : **Perorangan**

Telah melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 02 Januari s/d 25 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Benteng, 6 Februari 2023  
**INSPEKTUR DAERAH,**



**H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630727 199303 1 014



- UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmail.com  
Kode Pos 92812 Sulawesi Selatan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/45/II/2023/DISPMD

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, menerangkan bahwa :

Nama : Zahra Inayah  
NIM : B021181007  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin  
Jurusan : Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Bumdes di Kabupaten Kepulauan Selayar

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Januari sampai 19 Januari 2023.

Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Benteng, 6 Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**



**IRWAN BASO, S.STP**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP. 1980422 199912 1 003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
- Dokumen ini dtandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code